



# BUMD Rp 1,5 Triliun Untuk Food Station Tjipinang

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dana Rp 1,5 triliun untuk memperkuat modal PT Food Station Tjipinang Jaya, badan usaha milik daerah di bidang pangan. Keberadaannya dinilai penting untuk menstabilkan harga pangan di ibu kota Jakarta, terutama beras.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, se usai mengikuti rapat umum pemegang saham di Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (31/3), mengatakan, harga beras rentan naik, antara lain karena permainan spekulasi dan tengkulak. Dia berharap tambahan modal dapat menambah stok beras PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) dan menjamin penyediaan pangan Ibu Kota.

Dengan demikian, inflasi sektor pangan terutama beras dapat dikendalikan dengan baik. Diharapkan, warga tidak terbebani lagi oleh fluktuasi harga atau keterbatasan pasokan di pasar.

Basuki mengatakan tengah menyisir anggaran yang sedang dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam proses penetapan peraturan gubernur tentang APBD DKI Jakarta tahun 2015. Sebagian dana akan dialokasikan untuk menambah modal FSTJ. Pemprov DKI memiliki sekitar 74 persen saham di FSTJ.

Direktur Utama PT FSTJ Dwi Ananto menambahkan, tambahan modal akan digunakan untuk membangun gudang serta kerja sama dengan petani di sentra pangan, seperti Karawang, Jawa Barat. Kebutuhan beras DKI Jakarta diperkirakan 3.000 ton per hari. Terdapat 700 kios di Cipinang dengan sekitar 7.000 penyalur yang tersebar di seluruh Jakarta.

"Cipinang menjadi pusat pasar beras dan menjadi barometer nasional. Berapa jumlah beras masuk, keluar, dan naik turunnya harga terus dipantau. Tambahan modal ini penting untuk mem-

bangun Cipinang lebih besar," kata Dwi.

## Evaluasi modal

Terkait usaha daerah, Pemprov DKI berencana mengevaluasi penyertaan modal dan menjual saham milik pemerintah daerah kepada sejumlah perusahaan. Selain tidak menguntungkan dari sisi keuangan, beberapa bidang usaha dinilai kalah bersaing dan cenderung rugi.

Persoalan itu menjadi salah satu hasil evaluasi Kemendagri atas rancangan APBD 2015. Sejumlah anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta juga menyampaikan hal itu dalam proses revisi draf APBD 2015 pada Rabu (18/3) dan Kamis (19/3) lalu.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-681 Tahun 2015, Kemendagri meminta Pemprov DKI mengambil upaya hukum dan atau efisiensi, rasionalisasi, serta restrukturisasi penyertaan modal pada lima perusahaan. Pertimbangannya, seluruh atau sebagian aset dan kekayaan perusahaan yang dimaksud merupakan kekayaan Pemprov DKI yang tercantum dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dan Pemprov DKI.

Perusahaan yang dimaksud adalah PD Dharma Jaya, PT Ratax Armada, PT Cemani Kota, PT Grahasahari Surya Jaya, dan PT Rumah Sakit Haji Jakarta. Laporan tersebut tertuang dalam lampiran rancangan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang APBD 2015 yang dilayangkan ke Kemendagri.

Sejumlah anggota Badan Anggaran DPRD mempertanyakan penyertaan modal pada sejumlah perusahaan itu. Namun, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, angka-angka yang dilampirkan dalam rancangan APBD merupakan nilai aset pada perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki Pemprov DKI. (MKN)